ABSTRACT

Medical midwifery complication is one of causes of the high Maternal Mortality Rate (MMR). In 2017, the percentage of Maternal Mortality Rate in Surabaya was 91.68%. From the assessment on the performance of public health center (PHC), 17 out of 63 public health centers have not achieved the target.

This study was an observational and analytical research with a cross-sectional design. The sample of this study included all public health centers in Surabaya amounted to 63 public health centers. This study aimed at identifying authority and competency of first level primary health care facilities as well as implementation of medical midwifery complication treatment. This study was conducted from May 2018 to January 2019.

The findings of this study showed that there was authority discrepancy of first level primary health care facilities in handling medical midwifery complications on the policy of PONED-PHC implementation guide in 2013 and Decree of Ministry of Health of Republic Indonesia Number HK.02.02/*Menkes*/514/2015. The binary logistic regression test showed that the variables of *Training for Emergency Treatment of Obstetrics and N*eonatal (PPGDON training), infrastructures and facilities, and intervention of medical midwifery complications have positive influence towards the target of medical midwifery complication treatment. Meanwhile, the variable of the competency of public health centers has negative influence towards the target of medical midwifery complication treatment.

It can be concluded from this study that there was a different authority on the policy in the era of pre and post National Health Insurance Programme. The competency and solution on the medical midwifery complications in public health centers in Surabaya were categorized into insuffecient. PPGDON training, infrastructures and facilities, and implementation of medical midwifery complication treatment have positive influence towards the treatment target of medical midwifery complications. Some efforts that can be done are giving PPGDON training to midwives, providing infrastructures and facilities to support the treatment of midwifery medical complications and improving the implementation of midwifery medical complication treatment.

Keywords**:** authority of first level primary health care facilities, competency of public health centers, midwifery medical complication treatment

ABSTRAK

Komplikasi kebidanan menjadi salah satu penyebab dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Pada tahun 2017 angka cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di kota Surabaya sebesar 91.68%. Jika dilihat dari capaian setiap Puskesmas masih banyak yang belum mencapai target yaitu sebanyak 17 pusksemas dari total 63 Puskesmas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik dengan desain *cross sectional.* Sampel pada penelitian ini adalah seluruh Puskesmas di Kota Surabaya yaitu sebanyak 63 Puskesmas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan dan kemampuan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), serta pelaksanaan penanganan komplikasi kebidanan. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2018 - Januari 2019.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian kewenangan FKTP dalam melakukan penanganan komplikasi kebidanan pada kebijakan Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas PONED tahun 2013 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/514/2015. Hasil uji pengaruh menunjukan variabel pelatihan PPGDON, ketersediaan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan penanganan komplikasi kebidanan memiliki pengaruh yang positif terhadap capaian cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, sedangkan variabel kemampuan Puskesmas memiliki arah pengaruh yang negatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan kewenangan pada kebijakan sebelum dan setelah era JKN. Kemampuan dan pelaksanaan penanganan komplikasi kebidanan di Puskesmas Kota Surabaya masih ada yang termasuk kategori kurang. Pelatihan PPGDON, ketersediaan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan penanganan komplikasi kebidanan memberikan pengaruh positif terhadap target cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan PPGDON pada bidan, sarana dan prasarana untuk menunjang penanganan komplikasi kebidanan, dan meningkatkan pelaksanaan penanganan komplikasi kebidanan.

Kata kunci: Kewenangan FKTP, kemampuan Puskesmas, penanganan komplikasi kebidanan